

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilukada serentak pada Februari 2017 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan. Pemilukada Kabupaten Kulon Progo diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo.

Salah satu bagian dari pemilu adalah pemilih atau orang yang ikut berpartisipasi dalam proses pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga negara (pemilih), bukan sebagai politisi (yang dipilih). Pemilihan langsung kepala daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Rakyat yang dianggap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung.¹

¹ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, edisi ke IX, 2013, hlm. 368.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik. Namun sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah kenegaraan.²

Pemilih merupakan warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau yang sudah menikah kemudian mempunyai hak untuk memilih.

Pemilih yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum akan didata dan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan pada Februari 2017, DPT di Kabupaten Kulon Progo untuk laki-laki sejumlah 161.348 jiwa dan perempuan sejumlah 170.863 jiwa, sehingga total jumlah semua DPT adalah 332.211. Jumlah DPT Pemula tercatat sebanyak 8.621 jiwa dan difabel sejumlah 1.135 jiwa.³

Sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, KPU Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh KPU adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan pada saat pemilihan kepala daerah sebelumnya. Pada tahun 2017 angka partisipasi politik mencapai 79,2%,⁴

² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hlm. 369.

³ "Anonim", Menulis Referensi dari Internet, 19 Desember 2018, kab-kulonprogo.kpu.go.id

⁴ Sutarmi, Menulis Referensi dari Internet, 23 Februari 2017, jogja.antaraneews.com

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan Komisioner KPU, bahwa sasaran sosialisasi Pemilu antara lain pemilih pemula, kalangan kampus, sekolah, organisasi masyarakat, partai politik, dan pemerintah daerah. Setelah KPU menetapkan sasaran itu kemudian KPU bersama-sama dengan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan mengundang perwakilan berbagai kalangan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi pemilu, perwakilan-perwakilan itulah yang kemudian diharapkan juga dapat membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu dengan baik kepada masyarakat luas.⁵

Berdasarkan hal di atas, penyusun bermaksud melakukan penelitian dengan judul **PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULONPROGO MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2017.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran KPU Kulon Progo untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah 2017 ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi KPU Kulonprogo guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah 2017 ?

⁵ Yusa Djuyandi, "Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum", *Marketing Comunication Department Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara Jakarta*, Vol. V No. II, (Oktober 2014), hlm. 1208

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran KPU Kulon Progo untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi KPU Kulon Progo guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini merupakan bentuk sumbangsih maupun kontribusi ilmiah yang nantinya diharapkan bisa digunakan sebagai masukan dan sumbangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Perubahan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak terkait khususnya penyelenggara pemilihan kepala daerah guna meningkatkan kinerjanya agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.